

## KONSEP SEKULARISASI DALAM PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID

**Budi Prayetno**

*Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga  
Jl. Kelapa No.613, Yogyakarta  
E-mail: bprayetno55@gmail.com*

### **Abstract**

The purpose of this research is to understand the secularization issue proposed by Nurcholish Madjid which is derived from the idea of renewing Islamic thinking. To achieve this objective, this research uses literature review method with the intention to trace how the idea of Nurcholish Madjid renewed. The approach used is by using the historical approach. The results of this research is the secularization initiated by Nurcholish Madjid in the 1970s is a response to the issue of modernization that developed especially among Indonesian Muslims. Nurcholish sees that secularization is necessary because Muslims are no longer able to distinguish between sacred and profane issues. Secularization is intended for Muslims to worldly things that are supposed to be worldly and to disengage the tendency for the sacred. One background of the idea of secularization is to respond to the idea of forming an Islamic state which according to Nurcholish Madjid is a form of failure of Muslims in responding to the problem of modernization.

### **Keywords;**

*Secularization, Modernization, Sacred, Profane*

### **I. Pendahuluan**

Nurcholish Madjid dikenal sebagai penarik gerbong pembaharu pemikiran Islam di Indonesia. Oleh pengamat Islam kontemporer, gagasannya dianggap sebagai paradigma intelektual gerakan pembaruan teologis di Indonesia.<sup>1</sup> Pada tahun 1970-an Nurcholish menyampaikan pidato di Taman Ismail Marzuki yang berjudul “*Keharusan Pembaruan dalam Islam dan Masalah Integrasi Ummat*”, inti dari pidato tersebut adalah kegelisahan intelektual Nurcholish melihat kebuntuan pemikiran umat Islam di Indonesia dan hilangnya kekuatan daya dobrak psikologis dalam perjuangan mereka. Kemandegan itu ia lihat dari bagaimana umat Islam tidak bisa membedakan hal yang bersifat transenden dan temporal. Bahkan umat Islam kadang menempatkan nilai-nilai temporal menjadi nilai transenden, begitupun sebaliknya.<sup>2</sup> Maka menurut Nurcholish upaya pembaruan pemikiran merupakan jalan keluar yang harus ditempuh untuk keluar dari kemandegan berpikir tersebut.

---

<sup>1</sup> Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 21

<sup>2</sup> Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Politik Islam di Indonesia...*, h. 137

Meski demikian Nurcholish dianggap sebagai sosok kontroversial karena gagasan yang sering ia lontarkan sering disalahpahami dan mendapat kritik tajam dari berbagai pihak bahkan teman dekat dia sendiri.<sup>3</sup> Salah satu gagasan yang sering menjadi kritik tersebut adalah ide sekularisasi. Menurut para pengkritiknya bahwa ide sekularisasi dapat menjadi hal yang berbahaya bagi akidah umat Islam karena merupakan gagasan yang berasal dari Barat. Selain itu ide sekularisasi dianggap memisahkan dunia dan akhirat padahal dalam Islam tidak mengenal konsep tersebut.

Namun sekularisasi menurut Nurcholish tidak demikian. Ia mengatakan bahwa sekularisasi tidaklah bermaksud sebagai penerapan sekularisme dan mengubah kaum muslim menjadi sekularis. Namun ini dimaksudkan agar umat Islam menduaniawikan hal-hal yang mestinya bersifat duniawi dan melepaskan kecenderungan untuk meng-*ukhrawikan*-nya.<sup>4</sup>

Dengan konsep tersebut, Nurcholish menyerukan agar kaum muslim berhenti menyucikan hal-hal yang memang tidak suci. Pada masa lalu wilayah suci itu relatif terbatas pada objek-objek fisik yang dikenal masyarakat, namun kemudian wilayah suci dan sakral tersebut berkembang luas ke dalam bentuk organisasi atau partai politik. Menurut Nurcholish jika umat Islam konsisten dengan tauhid yang dianutnya harusnya mereka melepaskan diri dari hal-hal yang tidak sakral selain hanya pada Tuhan. Dengan kata lain pemutlakan itu hanya untuk Tuhan, sehingga yang sakral hanya Tuhan semata.

Lebih lanjut Nurcholish menjelaskan bahwa sekularisasi dimaksudkan untuk lebih memantapkan tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah. Fungsi sebagai khalifah membuat manusia mempunyai kebebasan dalam mengatur dan bertindak dalam rangka memperbaiki kehidupan di muka bumi, sekaligus memberikan pembenaran bahwa manusia memiliki tanggungjawab akan perbuatan yang telah dilakukannya di muka bumi di hadapan Tuhan.<sup>5</sup>

Konsep sekularisasi Nurcholish menurut Fahri Ali dan Bahtiar Effendi, dimaksudkan sebagai lembaga bagi umat Islam untuk “membedakan” bukan “memisahkan” persoalan dunia dan akhirat. Dengan kata lain Nurcholish mencoba memberikan penafsiran baru mengenai istilah tersebut. Di sini istilah sekularisasi digunakan sebagai sarana untuk membumikan ajaran Islam, karena pada dasarnya sekularisasi dan sekularisme berbeda menurut Nurcholish.<sup>6</sup>

## ***II. Pembahasan***

### **A. Landasan Epistemologi Ide Sekularisasi Nurcholish Madjid**

---

<sup>3</sup> Endang Syaifuddin Anshori, Ridwan Saidi hingga Abdul Kadir Jaelani merupakan beberapa tokoh yang sering mengkritik ide sekularisasi Nurcholish. Selain itu H.M Rasyidi juga dengan keras mengkritik Nurcholish. Ia bahkan menulis sebuah buku khusus untuk mengkritik ide sekularisasi tersebut.

<sup>4</sup> Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 122.

<sup>5</sup> Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan..*, h. 124.

<sup>6</sup> Pardoyo, *Sekularisasi dalam Polemik*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993), h. 23.

Pemikiran utama Nurcholish berasal dari pemahamannya yang mendalam terhadap dua prinsip dasar Islam yaitu prinsip tauhid dan konsep manusia sebagai khalifah. Dari kedua premis tersebut Nurcholish mengatakan bahwa hanya Allah yang harus ditransendenkan dan memiliki kebenaran mutlak. Sebagai konsekuensi dari pemahaman tauhid seperti itu maka umat Islam seharusnya memandang persoalan keduniaan yang temporal (sosial, politik, kultural) seperti apa adanya. Karena memandang segala sesuatu yang ada di dunia dengan cara pandang transenden secara teologis dapat dianggap sebagai sesuatu yang menentang prinsip monoteisme Islam.<sup>7</sup>

Dalam makalah pembaruan pemikiran yang disampaikan pada tahun 1970, Nurcholish Madjid banyak menyampaikan gagasan yang dianggap kontroversial yakni gagasan “sekularisasi”. Konsep ini sebenarnya banyak meminjam istilah dari Harvey Cox seorang teolog berkebangsaan Amerika Serikat yang cukup dihormati. Dalam magnum opusnya *The secular city*, Harvey Cox mendefinisikan sekularisasi sebagai pembebasan manusia dari ajaran agama dan metafisika, peralihan perhatiannya dari dunia-dunia lain kepada dunia saat ini. Meski demikian sekularisasi menurut Cox berbeda dengan konsep sekularisme. Menurutnya sekularisme merupakan doktrin dan ideologi yang tertutup dan hampir menjadi kepercayaan dan agama baru. Sedangkan konsep sekularisasi mengimplikasikan sebuah proses kesejarahan. Sehingga sekularisasi pada dasarnya adalah sebuah perkembangan yang mengandaikan pembebasan manusia.<sup>8</sup>

Pandangan Harvey Cox tersebut mengenai “pembebasan” dan “perbedaan sekularisasi dan sekularisme” yang digunakan oleh Nurcholish dalam mengartikulasikan gagasan-gagasan mengenai konsekuensi logis dari monoteisme Islam seperti yang ia tulis dalam makalahnya;

Sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme, sebab *secularism is the name of an ideology, a new closed world view which function very much like a new religion*. Dalam hal ini yang dimaksud (dengan sekularisasi) ialah setiap bentuk *liberating development*. Proses pembebasan ini diperlukan karena umat Islam, akibat perjalanan sejarahnya sendiri, tidak sanggup lagi membedakan nilai-nilai yang disangkanya islami mana yang tansenden mana yang temporal. (demikian juga) sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme dan mengubah kaum muslim menjadi sekularis. Tapi menduniawikan hal yang sifatnya duniawi dan melepaskan Islam dari kecenderungan meng-ukhrawi-kannya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Prinsip tauhid Nurcholish ini banyak dipengaruhi ketika ia berkunjung ke Saudi yang berpaham teologi wahabi. Menurutnya orientasi umat Islam pada wahabi sangat semangat dalam melakukan pemurnian sehingga tidak ada sesuatu yang sakral selain Allah.

<sup>8</sup> Harvey Cox, *The secular city*, (New York: The Macmillan Company, 1966), h. 7

<sup>9</sup> Nurcholish Madjid, *Keharusan Pembaruan Pemikiran Dalam Islam Dan Masalah Integrasi Ummat*, 5

Dengan pernyataan itu, Nurcholish tidak saja memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan sekularisasi, tapi menjelaskan lagi posisinya sejak semula yang menentang paham sekularisme.

Sekularisasi lebih lanjut bertujuan untuk memantapkan tugas duniawi manusia sebagai “khalifah Allah di muka bumi”. Tugas manusia sebagai khalifah tersebut yang memberikan adanya ruang kebebasan manusia dalam bertindak. Kebebasan dalam bertindak tersebut bisa menjadikan manusia melakukan kebaikan dalam kehidupannya dan hal itu bisa berarti arah menuju kemajuan peradaban. Hal inilah yang memberikan pembenaran bagi adanya tanggungjawab manusia di hadapan Tuhan kelak setelah hidup. Tetapi yang terjadi pada umat Islam sekarang adalah mereka kehilangan kreativitas dalam hidup keduniaan. Hal ini mengesankan seolah-olah mereka lebih memilih diam dan pasrah akan keadaan. Sebagai konsekuensi muncullah paham fatalisme yang membelenggu pemikiran umat Islam.

Istilah “sekularisasi” dimaksudkan sebagai proses yang diperlukan yang akan memungkinkan masyarakat Islam membedakan antara nilai temporal dan transenden. Bagi Nurcholish “sekularisasi” yang dipahami sebagai kondisi yang membebaskan adalah juga kondisi sebab akibat yang harus ada dan sejalan dengan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Antara lain adalah mengaitkan universalisme Islam dengan kenyataan Indonesia dewasa ini.<sup>10</sup>

### **B. Konsep Sekularisasi Nurcholish Madjid**

Agenda sekularisasi Nurcholish Madjid tersebut kemudian mendapat kritik keras. Sebagian besar kritik itu dipicu karena penggunaan istilah “sekularisasi”. Sejak dekade 1980-an Nurcholish tetap konsisten dengan substansi gagasan tersebut, meski pada akhirnya ia sedikit merevisi istilah “sekularisasi” menjadi “desakralisasi” atau “devaluasi radikal”. Pandangan ini dipengaruhi oleh Talcott Parson dan Robert N. Bellah. Menurut Bellah, paham devaluasi radikal mempunyai kaitan dengan proses awal umat Islam. Bahkan lebih lanjut, paham ini merupakan salah satu struktur penting di masa nabi Muhammad ketika beliau membangun masyarakat Madinah. Bellah beranggapan bahwa devaluasi dapat disebut sebagai sekularisasi terhadap semua struktur sosial yang ada dihadapan Tuhan-manusia yang menjadi pusat ini. Diatas segalanya ini berarti dihapuskannya ikatan-ikatan kekerabatan yang sudah lama menjadi lokus utama dari yang sakral di dunia Arab pra-Islam.<sup>11</sup>

Implikasi dari pernyataan teologis semacam itu, menurut Nurcholish adalah bahwa tidak ada sama sekali yang sakral dalam persoalan negara Islam, partai Islam atau ideologi Islam. Sehingga sejalan dengan itu kaum muslim harus menerima itu sebagai konsekuensi logis dari prinsip tauhid. Dalam hal ini ia memperkenalkan jargon “Islam Yes, Partai Islam No”. Dengan jargon itu ia mengarahkan teman-temannya kepada komitmen dalam substansi nilai Islam bukan pada lembaga-lembaga meskipun

<sup>10</sup> Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara*, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 34.

<sup>11</sup> Robert N. Bellah, *Islamic Tradition And The Problem Of Modernization*, (New York: Evanston, 1970), h. 151

lembaga itu menggunakan simbol Islam seperti Partai Islam.<sup>12</sup> Dengan konsep sekularisasi tersebut, Nurcholish menyerukan agar umat Islam untuk berhenti mensucikan sesuatu yang memang tidak suci. Proses sekularisasi diperlukan karena umat Islam tidak mampu lagi membedakan hal yang sifatnya transenden dan temporal. Bahkan ada kecenderungan untuk mentransendenkan hal yang temporal.

Ide tentang “Islam Yes, Partai Islam No” berasal dari pandangan secara faktual dan berasal dari pengamatan langsung Nurcholish terhadap situasi umat Islam pada masa itu. Ketika ia menjadi aktivis, dan mengunjungi berbagai daerah hingga melihat umat Islam menjalankan atau mengamalkan agama mereka. Namun menurut Nurcholish, aktivitas mereka jauh dari masalah-masalah yang dibahas oleh pimpinan umat Islam dan elit politik. Misalnya ketika Nurcholish melakukan kunjungan ke Bandung Jawa Barat, ia berdialog dan berinteraksi langsung dengan masyarakat khususnya kaum muda. Namun hasil perbincangan mereka semakin memantapkan asumsi Nurcholish bahwa ada kesenjangan besar yang terjadi antara umat Islam dan pemimpin mereka.<sup>13</sup>

Dalam makalah yang dibacakan dalam pidato di Taman Ismail Marzuki, Nurcholish memformulasikan realitas yang diamatinya itu dengan sebuah pertanyaan “sampai dimanakah umat Islam tertarik kepada partai-partai atau organisasi Islam? Kemudian dengan melihat realitas di lapangan, ia berkesimpulan bahwa hanya sedikit saja dari kaum muslim yang tertarik dengan Partai Islam. Sehingga muncullah istilah “Islam Yes, partai Islam no”. Selain itu, Nurcholish juga meragukan partai-partai Islam tersebut sebagai wadah untuk memperjuangkan ide-ide berdasarkan Islam. Alasannya karena ide-ide tersebut sudah tidak menarik atau dengan kata lain ide itu telah memfosil dan kehilangan dinamika. Ditambah lagi partai Islam tidak berhasil membangun image positif dan simpatik, bahkan banyak diantaranya terlibat dalam kasus korupsi.<sup>14</sup>

Nurcholish merupakan salah satu pemikir Islam modern menolak pendapat tentang perlunya menyatukan agama dan negara dalam bentuk hukum positif. Hal ini terlihat ketika pada masa dimana munculnya isu pembentukan negara Islam pada era tahun 70-an. Ketika itu muncul kembali gagasan untuk kembali mewujudkan negara Islam dan kembali ke Piagam Jakarta melalui Masyumi. Pembahasan mengenai hubungan negara dan agama (khususnya Islam) pada saat itu cukup banyak dipersoalkan. Namun Nurcholish yang juga dekat dengan tokoh Masyumi tidak sepatutnya dengan ide tentang penyatuan negara dan agama. Ia bahkan sering menyebut pihak yang selalu berambisi mencita-citakan negara Islam sebagai orang yang berapologi semata.<sup>15</sup>

Ceramah Nurcholish di Taman Ismail Marzuki pada tahun 1970 menyinggung soal konsep negara Islam yang kembali ramai diperbincangkan pada saat itu. Dalam pidato tersebut Nurcholish menyinggung tentang “apologi negara Islam” yang

<sup>12</sup> Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara*, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 144

<sup>13</sup> Ahmad Gaus, *Api Islam*, (Jakarta: Kompas, 2012), h. 93

<sup>14</sup> Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1987), h. 205

<sup>15</sup> M. Syafi Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 56.

kemudian mendapat banyak kritik termasuk dari H.M Rasyidi. Dalam pidato tersebut menurut Nurcholish, gagasan negara Islam merupakan sebuah bentuk apologi umat Islam dalam menghadapi ideologi Barat seperti Demokrasi, Sosialisme, Komunisme, Liberalisme dan lain-lain. Ideologi tersebut mempunyai pengaruh sedemikian besar di berbagai negara sehingga umat Islam merasa khawatir dan melakukan *counter* terhadap ideologi tersebut dengan menawarkan alternatif “negara Islam” meskipun secara konseptual masih abstrak. Nurcholish menulis dalam pidatonya;

“Gagasan negara Islam merupakan suatu bentuk kecenderungan apologetik. Pertama kecenderungan apologetik terhadap ideologi Barat (modern) seperti demokrasi, sosialisme, komunisme, dan lain-lain sebagainya. Ideologi-ideologi itu sering bersifat totaliter artinya bersifat menyeluruh dan mendetail, meliputi setiap bidang kehidupan, khususnya sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain. Apologi kepada ideologi tersebut menimbulkan apresiasi kepada Islam yang bersifat ideologis-politis, dengan demikian membawa kepada aspirasi “Negara Islam” sebagaimana ada negara demokrasi, negara sosialis, negara komunis dan seterusnya.”<sup>16</sup>

Menurut Nurcholish, ada dua hal yang mengakibatkan munculnya sikap apologetik gagasan “negara Islam” oleh sebagian umat. Yang pertama, diakibatkan karena umat Islam sedang mengalami *inferiority complex* atau rasa rendah diri karena berhadapan dengan Barat yang lebih maju dalam berbagai bidang seperti sosial, politik, ekonomi, budaya dan seterusnya. Akibat hegemoni tersebut muncullah rasa rendah diri yang kemudian menimbulkan sikap apologi dengan menolak semua gagasan dari Barat termasuk sistem sosial politik seperti demokrasi. Selanjutnya rasa rendah diri ini pula yang melahirkan apresiasi ideologis yang bersifat totaliter kepada Islam, sehingga melahirkan cita-cita “negara Islam”. Kedua, akibat legalisme yang berlebihan. Legalisme dalam hal ini adalah kelanjutan dari fiqh-isme. Dan kecenderungan fiqh-sentris ini menjadi salah satu bentuk kekakuan umat Islam dalam hidup bernegara di era modern. Fiqh-isme kemudian lebih dominan di kalangan umat Islam sehingga gerakan-gerakan reformasi umat Islam lebih mengarah pada legalitas tersebut.<sup>17</sup>

Lebih lanjut menurut Nurcholish bahwa terkadang syariat Islam yang dimaksud hanya terbatas pada aspek hukum Islam atau fiqhi saja, padahal cakupan syariat Islam lebih luas dari hal tersebut seperti keadilan, kebebasan dan kemerdekaan seseorang. Ia kemudian menegaskan bahwa konsep negara Islam itu adalah sebuah bentuk distorsi hubungan proporsional antara agama dan negara. Negara adalah kehidupan sosial kolektif, sedangkan agama dimensinya lebih kepada spiritual-pribadi.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1987), h. 253.

<sup>17</sup> Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan...*, h. 254.

<sup>18</sup> M. Syafi Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 59.

Fiqh menurut Nurcholish, adalah sebuah hasil ijtihad dan produk pemikiran pada masa lalu, dan sudah kehilangan relevansinya pada saat ini. Kemudian hal tersebut sudah ditangani oleh kaum reformis. Perombakan total sehingga sesuai dengan pola kehidupan modern diperlukan agar umat Islam bisa menjadi lebih kontekstual. Tentu hal itu memerlukan ijtihad yang sungguh-sungguh disertai dengan ilmu pengetahuan. Nurcholish mengajak agar umat Islam tidak hanya mementingkan kelompoknya saja, akan tetapi lebih memperlihatkan kontribusi bagi kelompok yang lain demi mengatur kehidupan bersama.<sup>19</sup>

Dalam makalah Nurcholish yang membahas partai Islam, ia berkesimpulan bahwa partai Islam tidak menarik lagi. Karena itu ia melontarkan alternatif baru yaitu sebuah jargon yang dikenal “Islam yes partai Islam no”. dengan rumusan tersebut, ia seperti menegaskan komitmen dan pendiriannya bukan kepada institusi keislaman seperti halnya partai politik. Jadi yang ditolak oleh Nurcholish bukan karena Islamnya, akan tetapi ia menolak kepada pemanfaatan simbol Islam oleh mereka yang terlibat dalam politik praktis. Menurutnya tingkah laku dan pemanfaatan Islam seperti itu justru menjatuhkan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya.

Penolakan itu terjadi karena situasi politik saat itu menurut Nurcholish karena pemimpin politik tidak lagi mencerminkan aspirasi umat Islam tetapi mereka hanya berjuang untuk kepentingan golongannya sendiri. Selain itu mereka terkotak-kotak dalam madzhab dan aliran yang berbeda-beda, serta tidak mempunyai komitmen yang jelas bagi umat Islam. Lebih parah lagi banyak aktor politik partai Islam yang terlibat dalam kasus korupsi. Ini semua memperburuk citra Islam menurut Nurcholish.<sup>20</sup>

Dalam kondisi seperti itu Nurcholish juga menyayangkan karena umat Islam pada saat itu lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Kebanggaan pada faktor mayoritas tersebut mendorong mereka untuk memprioritaskan usaha-usaha persatuan untuk menghadapi apa yang mereka anggap sebagai ancaman. Akibatnya umat Islam sepertinya terbuai dengan jargon-jargon simbolik dan tidak bersikap dinamis terhadap pembangunan. Mitos kuantitas dan persatuan ini menimbulkan cacat sehingga menurut Nurcholish diperlukan terobosan baru. oleh karena itu ia menawarkan alternatif liberalisasi untuk memecahkan persoalan tersebut.

### **C. Respon Cendekiawan Muslim terhadap Ide Sekularisasi Nurcholish Madjid**

Gagasan Nurcholish tersebut kemudian mengundang reaksi yang cukup keras baik dari kalangan intelektual muda atau kalangan tua. Kalangan muda yang memberi tanggapan antara lain Endang Syaifuddin Anshari, Ismail Hasan, dan Abdul Qadir Djaelani. Sedangkan dari kalangan tua seperti H.M. Rasyidi, Muhammad Natsir dan Hamka. Abdul Qadir Djaelani dari kalangan muda misalnya mengatakan bahwa Nurcholish hendak menganjurkan paham sekuler yang bertentangan dengan Islam. Padahal menurutnya Islam tidak sejalan dengan sekularisme tersebut. Endang

<sup>19</sup> Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1987), h. 255.

<sup>20</sup> M. Syafi Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 50.

syarifuddin Ansari (meski dalam beberapa hal sepakat dengan Nurcholish) juga berpendapat bahwa memang di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan konsep negara Islam, akan tetapi mengingkari bahwa al-Qur'an memberikan kaidah tentang kenegaraan merupakan distorsi besar. Endang menanggapi bahwa seolah-olah Nurcholish ingin membuktikan bahwa setiap usaha umat Islam untuk menuju kekuasaan dianggap sebuah dosa besar.<sup>21</sup>

Sedangkan dari kalangan tua yang diwakili Rasyidi, ia berpendapat pandangan Nurcholish sangat naif karena bersumber dari kekacauan berpikir. Bahkan Rasyidi menuduh Nurcholish sebagai seorang yang mirip dengan Orientalis yang begitu tinggi kecurigaannya terhadap Islam. Ia juga memperingatkan agar umat Islam khususnya kalangan muda untuk berhati-hati dengan ide pembaruan Nurcholish. Begitupun dengan Hamka dan Natsir, meski tidak secara langsung menyebut nama Nurcholish tapi dalam beberapa pidatonya, ia menganjurkan agar umat Islam lebih berhati-hati dengan ide pembaruan tersebut. Ia menyeru agar umat Islam lebih bersatu sehingga cita-cita politik bisa tercapai.<sup>22</sup>

Untuk menghadapi berbagai reaksi tentang ide pembaruan tersebut, Nurcholish lebih memilih tidak menanggapi secara serius. Hal ini dilakukan untuk menghindari polemik yang berkepanjangan, apalagi banyak yang tidak bisa memahami ide pembaruan yang digagasnya. Hal itu terlihat dari banyaknya tanggapan kemarahan dan kecurigaan karena tidak bisa memahami gagasan pembaruan tersebut. Nurcholish bahkan dianggap sudah dianggap melenceng dan murtad, bahkan yang lebih serius banyak ancaman yang ditujukan padanya.<sup>23</sup>

Sebaliknya bagi para pendukung gagasan Nurcholish lebih memilih untuk diam dan memperkokoh pendiriannya meskipun bertentangan dengan arus utama. Diantara nama-nama yang mendukung ide Nurcholish tersebut diantaranya Djohan Effendi, Utomo Danajaya, Eky Syahrudin, Usep Fathuddin.<sup>24</sup> Salah satu dari pendukung gagasan Nurcholish seperti Dawam Raharjo bahwa mereka lebih memilih melawan arus dan memberanikan diri melawan umat, karena menurutnya apa yang dikehendaki oleh umat tersebut bukanlah yang mereka butuhkan. Ia juga mengkritik pendekatan yang dilakukan oleh umat Islam yang cenderung menjadikan Islam sebagai ideologi. Hal itu menurutnya bisa saja menjadikan Islam terdistorsi ke ruang yang lebih sempit dan berhadapan dengan ideologi lain seperti Sosialisme atau Nasionalisme. Ia berpendapat bahwa ideologi itu adalah teori-teori dan pernyataan yang berhubungan dengan agenda sosial politik, meskipun menurutnya Islam juga memiliki agenda sosial politik tapi

---

<sup>21</sup> M. Syafi Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 51.

<sup>22</sup> M. Syafi Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru...*, h. 53.

<sup>23</sup> M. Syafi Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia...*, h. 65.

<sup>24</sup> Pardoyo, *Sekularisasi dalam Polemik*, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1993), h. 97.



ajaran Islam jauh lebih luas daripada agenda politik tersebut.<sup>25</sup> Sama halnya dengan Dawam, Nurcholish juga berpendapat bahwa Islam bukanlah ideologi. Karena menurutnya jika Islam adalah sebuah ideologi maka ia merupakan produk pemikiran manusia sama halnya dengan ideologi sosialisme, kapitalisme dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya Islam sebagai kebenaran mutlak dipertanyakan.

Untuk menyongsong masa depan Islam, Nurcholish mengharapkan agar umat Islam bersikap rasional dan realistis dalam menghadapi era pembangunan. Ia menganjurkan umat Islam agar melahirkan ide baru yang bisa dijadikan alternatif. Tetapi alternatif tersebut harus lebih bersifat modern, terbuka, rasional, realistis serta melintasi keragaman suku dan agama. Namun ia pun mewanti-wanti agar nantinya ideologi tersebut tidak terjebak pada pengkultusan ide tersebut nantinya, tetapi harus disertai dengan sikap kritis dan rasional. Adapun mengenai alternatif atau ide baru yang akan dilahirkan, Nurcholish berharap agar ide itu bisa memecahkan persoalan nyata yang dihadapi oleh rakyat maupun anggota partai politik.

#### **D. Refleksi Terhadap Gagasan Sekularisasi Nurcholish Madjid (Kasus Hubungan Islam dan Negara)**

Sebagai seorang pemikir pembaruan Islam yang punya reputasi tinggi, tentu Nurcholish tidak muncul begitu saja dalam panggung tersebut. Ia sejak awal mempunyai ketertarikan tinggi pada dunia intelektual, selain itu ia terlibat dalam dunia keorganisasian dan kemahasiswaan, kemudian sering dikaitkan dengan partai Masyumi. Ketertarikan yang cukup besar pada dunia keilmuan tersebut mengantarkannya menjadi salah satu figur pemikir pembaharu yang diperhitungkan tak terkecuali bagi peneliti Barat.

Sosok Nurcholish muda yang aktif dalam dunia aktivis kemahasiswaan dan ditopang dengan kemampuan intelektual sering dicitrakan sebagai “Natsir muda”.<sup>26</sup> Sebagai seorang pemikir Islam generasi 70-an, ia mengemukakan apa yang ia sebut “tinjauan Islam terhadap modernitas”. Dalam artikelnya yang berjudul “rasionalisasi bukan westernisasi”, Nurcholish modernisasi adalah rasionalisasi yang didalamnya terkandung makna kemajuan dan perombakan pola pikir yang maju. Proses modernisasi tersebut menurutnya bisa dimungkinkan dengan syarat penguasaan ilmu pengetahuan. Ia bahkan mengatakan bagi seorang muslim bahwa modernisasi adalah suatu keharusan, karena pada dasarnya modernisasi berarti berpikir dan bekerja menurut fitrah dan sesuai dengan sunnatullah yang *haqq*. Menjadi modern berarti mengembangkan kemampuan berpikir yang diberikan oleh Tuhan, berpikir dinamis dan progresif. Namun Nurcholish juga menekankan bahwa yang dimaksud modernisasi bukanlah westernisasi atau meniru

---

<sup>25</sup> M. Syafi Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*,.. h. 67.

<sup>26</sup> Muhammad Kamal Hasan, *Modernisasi Indonesia; Respon Cendekiawan Muslim*, (Jakarta: Lingkar Studi Indonesia), 43.

gaya hidup Barat. Ia hanya sepakat pada aspek spirit dari modernisasi yaitu semangat kemajuan berpikir.<sup>27</sup>

Gagasan modernisasi yang dikemukakan oleh Nurcholish mengandaikan beberapa hal termasuk tentang perlunya sekularisasi. Sebagaimana yang sering dijelaskan bahwa sekularisasi tentu bukanlah sekularisme sebagaimana yang menjadi ideologi di Barat. Tetapi maksud dari sekularisasi yang dimaksud Nurcholish adalah sebagai bentuk liberalisasi dalam artian pembebasan manusia dari pandangan keliru yang sudah mapan. Dan sekali lagi sekularisasi bukanlah penerapan sekularisme.

Dalam melihat pola hubungan agama dan negara dalam konteks sekarang ini setidaknya ada tiga model pendekatan,<sup>28</sup> yakni *integrated* (penyatuan agama dan negara), *intersectional* (persinggungan agama dan negara), dan sekularistik (pemisahan agama dan negara). Di era modern sendiri (khususnya di negara-negara Barat) hubungan agama dan negara dianggap sudah selesai dengan menganut prinsip sekularistik yakni urusan agama dibedakan dengan negara. Sementara di beberapa negara menganut prinsip integralistik dimana agama dan negara tidak dipisahkan satu sama lain. Prinsip ini diterapkan di beberapa negara di Timur Tengah seperti Saudi Arabia atau Iran. Sedangkan negara yang menganut prinsip integralistik seperti di Indonesia sendiri, meskipun banyak pendapat mengatakan bahwa Indonesia adalah negara sekuler karena secara jelas memisahkan wilayah agama dan negara. Hal itu karena Indonesia sendiri adalah negara yang secara konstitusional tidak menganut penyatuan agama dan negara. Kesepakatan pendiri bangsa ini pada awal pembentukan dengan jelas menghasilkan konsensus tentang dasar negara. Sehingga meskipun melalui proses perdebatan yang begitu panjang, negara dengan tegas dinyatakan bukan negara yang berdasar agama tertentu.

Meski demikian perdebatan panjang mengenai hubungan agama dan negara sering terjadi hingga saat ini. Setidaknya terdapat pola-pola lama yang terjadi dalam menyikapi hubungan agama dan negara pada masa lalu yang hingga saat ini terulang kembali. Pola tersebut yakni adanya sebagian kelompok yang berpandangan bahwa agama dan negara harus menyatu dan tidak boleh dipisahkan. Pendapat seperti ini muncul akibat adanya ketidakmampuan dalam memahami situasi dan konteks bagaimana beragama dan bernegara di era modern saat ini. Secara epistemologi, pemikiran ini muncul akibat adanya keyakinan bahwa negara yang tidak berdasar agama adalah berbahaya. Selain itu pendapat tersebut muncul akibat adanya romantisme masa lalu, dalam hal ini sejarah Islam pada masa abad pertengahan yang menjadi imperium besar dan menguasai wilayah yang sangat luas sehingga menjadi negara terkuat pada masanya. Negara tersebut dikenal sebagai negara dengan konsep kekhalifahan yang menyatukan antara pemerintah dan agama. Hal itulah yang

---

<sup>27</sup> M. Syafi Anwar, "Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru", 42.

<sup>28</sup> Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 2.

dirindukan kembali sehingga pemikiran tentang perlunya penyatuan agama (khususnya Islam) dan negara menjadi mutlak.<sup>29</sup>

Pandangan tersebut selain dirasa tidak relevan dengan konteks saat ini, juga hal itu dipandang menghabiskan energi. Seperti diketahui bahwa perdebatan tersebut sudah muncul ketika masa awal kemerdekaan dimana terjadi perdebatan sengit antara kubu nasionalis sekuler yang diwakili Soekarno dan nasionalis religius yang diwakili Muhammad Natsir dalam sidang BPUPKI. Namun hasil perdebatan itu diakhiri dengan kesepakatan bahwa negara tidak berdasarkan satu agama tertentu, karena melihat pluralitas yang ada di Indonesia pada saat itu. Selain itu muncul pula ancaman dari berbagai daerah yang mayoritas menganut agama tertentu yang mengancam akan memisahkan diri dari Indonesia jika negara hanya berdasar satu agama tertentu. Hal-hal tersebut menjadi perhatian bagi tokoh nasional pada saat itu sehingga penetapan dasar negara berdasar pluralitas yang tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945 terwujud.<sup>30</sup>

Oleh sebab itu, penting untuk melihat kembali gagasan yang dikemukakan oleh Nurcholish tentang sekularisasi. Karena gagasan tersebut muncul dari situasi dan kondisi pada saat ini yang tidak jauh berbeda pada saat itu. Gagasan penyatuan agama dan negara juga diwarisi dari pemikiran masa lalu dan nampaknya akan terus ada. Tidak adanya kemampuan untuk melihat secara jernih dan membedakan wilayah agama dan negara menjadi problem besar. Persoalan yang bukan agama kadang dianggap sebagai persoalan agama seperti persoalan politik. Inilah yang diwacanakan oleh Nurcholish bahwa umat Islam harus membedakan wilayah sakral dan profan sehingga tidak terjebak pada fanatisme berlebihan.

Oleh sebab itu, perdebatan antara hubungan agama dan negara yang sering terjadi dan berulang-ulang tersebut harusnya menjadi perhatian saat ini. Melihat begitu banyaknya energi yang dihabiskan sementara di sisi lain pembangunan bangsa dan negara menjadi terlupakan. Karena pada dasarnya masih banyak hal yang harus dibenahi oleh setiap elemen bangsa termasuk oleh umat beragama dalam menghadapi tantangan kebangsaan di masa depan. Tantangan itu seperti bagaimana mengatasi keadilan sosial, pembangunan, kesejahteraan rakyat, ketimpangan sosial dan seterusnya

### III. Kesimpulan

Sekularisasi menurut Nurcholish Madjid pada dasarnya tidak sama dengan konsep sekularisme, tapi dalam hal ini sekularisasi yang dimaksud ialah bentuk *liberating depelompent* dan proses pembebasan. Hal ini diperlukan umat Islam karena dalam perkembangannya tidak sanggup lagi membedakan nilai-nilai yang disangkanya islami mana yang tansenden mana yang temporal. Demikian juga sekularisasi tidaklah

---

<sup>29</sup> Zuli Qodir, *Gerakan Sosial Islam di Indonesia; Manifesto Kaum Beriman*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), iv

<sup>30</sup> Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Asas Negara*, (Jakarta: LP3ES, 1998), 56.

dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme dan mengubah kaum muslim menjadi sekularis. Tapi menduniawikan hal yang sifatnya duniawi dan melepaskan Islam dari kecenderungan meng-ukhrawi-kannya.

Ide sekularisasi Nurcholish sebenarnya ditujukan untuk merespon persoalan politik Indonesia pada tahun 1970-an. Hal ini utamanya karena umat Islam tidak lagi mampu membedakan mana urusan agama dan negara. Sebagian elit politik saat itu kembali menggagas ide pembentukan negara Islam yang menurut Nurcholish, gagasan negara Islam merupakan sebuah bentuk apologi umat Islam dalam menghadapi ideologi Barat seperti Demokrasi, Sosialisme, Komunisme, Liberalisme dan lain-lain. Ideologi tersebut mempunyai pengaruh sedemikian besar di berbagai negara sehingga umat Islam merasa khawatir dan melakukan counter terhadap ideologi tersebut dengan menawarkan alternatif “negara Islam” meskipun secara konseptual masih abstrak. Menurutnya cita-cita negara Islam tidak ada dalam Al-Qur’an atau Hadis secara konkrit, namun hanya penjelasan tentang bagaimana nilai-nilai Islam harus dijalankan. Ia kemudian menekankan perlunya rasionalisasi khususnya dalam pengambilan keputusan yang bersifat konsensus-kenegaraan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abed al-Jabiri, Muhammad, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*, Yogyakarta, LKiS, 2001.
- An-Naim, Abdullah, *Islam dan Negara Sekular; Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Bandung: Mizan, 2009.
- Anwar, Syafi, *Negara Masyarakat dan Artikulasi Politik Orde Baru*, Bandung: Mizan, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi Pembaruan Pemikiran Islam*, Jurnal Ulumul Qur’an, No.1, 1993.
- Azra, Azyumardi, *Menuju Masyarakat Madani; Gagasan Fakta dan Tantangan*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993.
- Aziz Thaba, Abdul, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insan Press, 1996.
- Berger, Peter L, *The Sacred Canopy*, terj. Hartono, Jakarta: LP3ES, 1990
- Bellah, Robert, *Beyond Belief*, New York: Harper & Row Publisher, 1970.
- Bellamy, Richard, *Social Modern Theory*, Terj. Vedi R Hafiz, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Charis, Ahcmad dan Anton Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Cox Harvey, *The Secular City*, New York: Macmillan Company, 1966.
- Chalik, Abdul, *Islam dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Interpena, 2012.
- Effendi, Bakhtiar, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran Dan Praktek Islam Di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.

- Effendi, Djohan dan Ismed Nasir (ed), *Pergolakan Pemikiran Islam; Catatan Harian Ahmad Wahib*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Emerson, Donal K, *Indonesia's Elite: Political Culture And Culture Politic*, New York: Cornell University Press, 1967.
- Federspiel, Howard, *Muslim Intellectual And National Development In Indonesia*, New York: Nova Science Publisher, 1992.
- Gaus, Ahmad, *Api Islam; Biografi Intelektual Nurcholish Madjid*, Jakarta: Kompas, 2012.
- Habiba Abror dkk, Robby, *Kajian Islam dalam Menghadapi Tantangan Global*, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Habiba Abror, Robby, *Amin Rais: Filosofi Aksi dan Pemikiran Kritis Reformis Muslim Indonesia*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015.
- Jurdi, Syarifuddin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia; Pertautan Negara, Khilafah dan Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka pelajar 2008.
- Karim, Abdul, *Wacana Politik Islam; Gerakan Politik Umat Islam Indonesia tiga Era*, Yogyakarta; SUKA Press, 2007.
- Liddle, William R, *Politics and Culture In Indonesia*, Michigan: Centre For Political Studys-Institute For Social Research, The University Of Michigan, 1988.
- \_\_\_\_\_. *Culture And Class Politic In New Order In Indonesia*, Singapore: Institute Of Southeast Asia, 1977.
- \_\_\_\_\_. *Modernizing Islam Indonesian Politic*, New Haven: Yale University Southeast Asian Studies, 1973.
- Madjid, Nurcholish, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1987.
- \_\_\_\_\_. *Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Visi Dan Tradisi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- \_\_\_\_\_. *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1993.
- \_\_\_\_\_. *Dialog Keterbukaan; Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- \_\_\_\_\_. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*, Jakarta: Paramadina. 1992.
- \_\_\_\_\_. *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina. 1994.
- \_\_\_\_\_. *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Visi dan Tradisi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina. 1995.
- \_\_\_\_\_. *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina. 1995.
- \_\_\_\_\_. *Kaki Langit Peradaban Islam*. Jakarta: Paramadina, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Tradisi Islam. Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Paramadina. 1997.
- \_\_\_\_\_. *Masyarakat Religius*. Jakarta: Paramadina. 1997.
- \_\_\_\_\_. *Bilik-Bilik Pesantren. Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina. 1997.

\_\_\_\_\_. *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.

\_\_\_\_\_. (ed). *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1994.

Munawar-Rachman, Budhy, *Membaca Nurcholish Madjid: Islam dan Pluralisme Agama*. Jakarta: Democracy Project, 2011.

Naquib al-Attas, Syed, *Islam dan Sekulerisme*, Bandung: Mizan, 2001